

DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

1. TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Transmigrasi dan tenaga Kerja untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan
2. FUNGSI : ➤ Perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, fasilitasi, koordinasi serta penetapan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 ➤ Menciptakan iklim usaha, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 ➤ Promosi Penanaman Modal serta Perizinan dan Non Perizinan baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat PMA/PMDN;
 ➤ Pengendalian atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 ➤ Pemantauan dan evaluasi Program bidang Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Mineral Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 ➤ Pembinaan administrasi kepegawaian, pembiayaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Energi Sumber Daya Mineral, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
1.	Meningkatnya Penyediaan Kebutuhan Sumber Air Bersih dan kebutuhan listrik bagi Rumah Tangga Sasaran	- Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan listrik
		- Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi air bersih	Jumlah rumah tangga yang terpenuhi kebutuhan air bersih melalui bantuan pembuatan sumur bor

2.	Meningkatnya akses layanan public dan ekonomi masyarakat transmigrasi	- Jumlah Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarana prasarana dan pembinaan bagi masyarakat transmigrasi
3.	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	- Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	$\frac{\Sigma \text{ kasus perselisihan hub industrial yang diselesaikan melalui perjanjian kerjasama}}{\Sigma \text{ kasus perselisihan hubungan industrial yang ada}} \times 100 \%$
4.	Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 dan perlindungan pekerja/buruh	- Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani	$\frac{\Sigma \text{ pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan yang ditangani}}{\Sigma \text{ pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan yang ada}} \times 100 \%$
5.	Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	- Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	$\frac{\Sigma \text{ Serapan tenaga kerja thn (n)} - \Sigma \text{ Serapan tenaga kerja thn (n-1)}}{\Sigma \text{ Serapan tenaga kerja thn (n-1)}} \times 100 \%$
6.	Meningkatnya Nilai Investasi	- Persentase peningkatan realisasi investasi	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Investasi thn (n)} - \Sigma \text{ realisasi Investasi thn (n-1)}}{\Sigma \text{ realisasi Investasi thn (n-1)}} \times 100 \%$
		- Jumlah PMA/PMDN	Jumlah pelaku investasi PMA/PMDN didapatkan berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja & pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi	- Nilai LKIP DPM-ESDMT	Nilai LKIP DPM-ESDMT Provinsi Gorontalo dari hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Gorontalo



 KEPALA DINAS
DR. I. MUSEN HASNI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600601 198603 1 001